

**UPAYA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) DALAM
MENGALANG DUKUNGAN INTERNASIONAL UNTUK
KEMERDEKAAN PAPUA**

RESUME SKRIPSI



SETA MEGANTARA (151080272)

PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

2013

Permasalahan

Papua

tidak terlepas perbedaan pandangan antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat.

Masalah pemerataan pembangunan setelah integrasi Papua ke Indonesia membuat

Papua semakin terpuruk sejak 1 Mei 1963. Masalah ekonomi dan pendidikan yang

terabaikan oleh pemerintah pusat membuat masyarakat asli

Papua

semakin tertinggal dari segi pendidikan dan pembangunan.

Masyarakat

Papua

menganggap pendidikan dan pembangunan lebih terpusat

di

Jawa,

padakenyataannya Papua memberikan sumbangsih yang potensial bagi pembangunan

Indonesia.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal Papua menjadi masyarakat yang

sering dirugikan dalam proses pembangunan Papua. Masyarakat Papua

merasa secara sistematis tersingkir dari semua sektor kehidupan sosial, politik, hukum,

dan ekonomi. Masalah sosial meliputi kurangnya pendidikan di Papua yang

berdampak pada kurangnya berkembangnya lapangan pekerjaan penduduk asli

Papua. Masalah politik,

sebagai

orang

Papua,

mereka tidak dilibatkan dalam masalah pengambilan kebijakan dan hanya 2 orang asli

Papua yang menjadi gubernur dalam rentang waktu tahun 1961-1988. Dari aspek hukum,

masyarakat Papua mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh TNI

terjadi pemberontakan, pemerintah saat itu sulit membedakan antara masyarakat asli

Papua yang bukan OPM dan OPM. Terakhir masalah ekonomi,

masyarakat Papua menjadi masyarakat

yang

terbelakang dalam bidang ekonomi. Karena kurang dapat bersaing dari pendatang.

Salah satu kebijakan

yang

sangat merugikan

orang

Papua

adalah setiap pengendalian pemerintahan di Papua tidak pernah memintapendapat atau tidak melibatkan orang Papua dalam proses pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah setiap upaya pembangunan yang berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sekolah dan pembangunan ekonomi. Akibatnya, pemerintah tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Papua dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Pembangunan yang tidak merata di kawasan Indonesia Timur membuat masyarakat menilai Papua tidak berkembang di era pemerintahan Soeharto. Pembangunan yang terkesan sangat lambat di Papua adalah alasan utama masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia, terlebih di zaman Orde Baru pemerintah yang otoriter dalam rezim Soeharto dan pembangunan yang terpusat di Jawa membuat masyarakat Papua merasa terabaikan selama 30 tahun (1969-1999) adalah alasan utama memisahkan diri dari Indonesia.

Permasalahan tuntutan kemerdekaan oleh masyarakat Papua Barat pada tahun 1961 pernah didukung oleh pemerintah Belanda, agar keinginan masyarakat Papua untuk merdeka diakui secara *de jure* pada Sidang Umum PBB pada tanggal 28 November 1961 namun usaha tersebut tidak tercapai.¹ Pada tahun 1961 pemerintah Belanda membentuk partai politik (*Nieuw Guinea Raad*) di Papua dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia, *Nieuw Guinea Raad* dipimpin oleh Marcus Kaisepo. Kemudian masyarakat Papua melalui partai politik saat itu (*Nieuw*

¹Decky Natalis Pigay, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000, hal 220.

Guinea Raad) mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda agar mereka boleh mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu kebangsaan Papua. Permohonan yang sudah diajukan oleh partai politik (*Nieuw Guinea Raad*) masyarakat Papua saat itu akhirnya disetujui oleh pemerintah Belanda.

OPM juga memanfaatkan teknologi internet “*On Line*” seperti www.facebook.com/freewestpapua dan <http://www.reocities.com/opm-irja/> sebagai salah satu media perjuangan. Teknologi informasi tidak saja mengubah sifat pemberontakan OPM menjadi lebih mudah dan cepat diterima masyarakat internasional, tetapi juga lebih efisien dalam hal cara dan hasil, sekaligus mampu memperbaiki *image* internasional bahwa OPM menjadi organisasi perjuangan pembebasan yang modern. Dunia maya merupakan sarana yang sangat berarti bagi kelompok-kelompok yang memiliki masalah identitas dan tekanan dari negara. Keterbatasan ruang gerak dalam dunia nyata dapat diatasi dengan bergerak di dunia maya yang tidak mengenal konsep ruang, waktu dan jarak, sehingga bagi OPM, internet menjadi pilihan untuk negosiasi dan membangun kembali identitas nasional, etnis, dan kultural yang terancam.

Perdebatan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia terus berlangsung di mana pemerintah Belanda terus berusaha untuk memerdekakan Papua Barat sesuai dengan tanggung jawabnya yang diberikan pasukan sekutu ketika mengalahkan penjajah Jepang di Papua Barat tahun 1942, sedangkan pemerintah Indonesia mengklaim bahwa wilayah Papua Barat

merupakan wilayah dari satu kesatuan NKRI berdasarkan pada prinsip-prinsip Indonesia bahwa semua bekas jajahan Hindia Belanda adalah Indonesia.

Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak yang sama di mata hukum, baik di mata Tuhan sekali pun. Hak-hak tersebut meliputi, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berkumpul dan berserikat, menyatakan pendapat, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapat pengidupan yang layak, dan hak untuk mengembangkan diri telah dijamin pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 34 UUD 1945. Namun dalam kasus Papua, masyarakat Papua tidak mendapatkan hak yang sama di mata hukum dan negara. Hak mereka seakan terabaikan oleh birokrasi yang “rusak” di masa Soeharto.

Masyarakat Papua yang semula sangat antusias berintegrasi dengan Indonesia dengan harapan bahwa mereka (masyarakat Papua) akan damai dan kesejahteraan justru berbanding terbalik dengan apa yang menjadi harapan masyarakat Papua. Mereka (masyarakat Papua) seakan menjadi masyarakat kelas dua yang dimarginalkan di tanah mereka sendiri. Bahkan pembangunan seakan terpusat di Jawa dan bagian barat saja. Tentu kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Ketimpangan ekonomi, pendidikan dan HAM adalah hal klasik yang membuat terjadinya pemberontakan oleh masyarakat Papua. Pemberontakan ini dicap pemerintah sebagai gerakan “Makar” dan diberi label Organisasi Papua Merdeka era Presiden Soekarno. Hingga terjadinya kecekauan di

wilayah Papua. Kekacuan ini adalah jalan akhir dari ungkapan rasa kecewa OPM atas pembangunan yang sangat minimalis di Papua.

Perjuangan pergerakan OPM, tidak hanya dapat diterima oleh komunitas asli Papua, namun juga sangat diinginkan oleh mereka yang percaya pada kesetaraan, keadilan, kebebasan, kebenaran dan kemanusiaan. Pasalnya sistem perjuangan OPM memiliki tujuan, menegakkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Hingga saat ini ditulis, masih banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Papua, salah satunya adalah dengan Otonomi Khusus. Namun tetap saja OPM ingin Papua menjadi negara merdeka yang lepas dari NKRI. Kemauan OPM lepas dari NKRI ini ditunjukkan atas adanya kepentingan asing yang turut intervensi masalah Papua. Intervensi ini dengan alasan HAM dan penegakkan keadilan di Papua. Namun pemerintah RI belajar dari kasus Timor-Timur (Timor Leste) yang lebih dulu lepas dari NKRI untuk lebih waspada terhadap “permainan catur asing” di Papua dan Indonesia.

Adanya dukungan (Negara dan LSM asing) membuat persoalan semakin kompleks. Campurtangan asing ini berpotensi mempercepat pemisahan diri antara Papua dan Indonesia. Upaya penanganan separatisme di Papua secara komprehensif terus dilakukan melalui kontradiplomasi terhadap upaya-upaya internasionalisasi proses integrasi Papua ke NKRI. Namun demikian kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan OPM perlu diwaspadai dengan baik. Pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan masih

sebatas wacana, merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya-upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, langkah rekonsiliasi dengan OPM masih membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilannya. Dengan demikian, langkah preventif untuk mencegah semakin mengakarnya gerakan OPM lebih tepat jika diarahkan melalui cara mengambil hati masyarakat Papua dengan membangun Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik